

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan dalam kaitannya dengan proses intermediasi keuangan memiliki peranan yang penting dalam pengalihan dana dari unit surplus dan atau unit defisit yang disalurkan dari satu unit ekonomi perusahaan, unit rumah tangga, dan pemerintahan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Namun dalam kenyataannya fungsi bank tidak hanya menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kepada masyarakat lagi, tetapi juga saat ini, peran bank sangat besar terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha yang meliputi perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra transaksinya.

Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, semakin berkembang pula kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mulai banyak menjamurnya *entrepreneur* di perkotaan, dan juga banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang menjamur di kalangan masyarakat pedesaan. Tidak diragukan lagi UMKM memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal

ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kuantitas UMKM, kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja yang tinggi, dan sumbangan terhadap produk domestik bruto yang tidak kecil.

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusi menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya *9 Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusi. Prinsip tersebut adalah “*leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*”.

Sejak itu, banyak forum-forum internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusi seperti CGAP, *World Bank*, APEC, *Asian Development Bank* (ADB), *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), termasuk standard body seperti BIS dan *Financial Action Task Force* (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia.

Data Global Findex (*Financial Inclusion Index*) yang baru dirilis Bank Dunia mencantumkan Indonesia sebagai negara dengan kemajuan tercepat di kawasan Asia Timur dan Pasifik dalam membawa masyarakat ke dalam sistem

keuangan formal sejak tiga tahun terakhir. Sekitar 48.9% orang Indonesia saat ini telah memiliki rekening bank. Indonesia menunjukkan lompatan besar dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan.

Sebelumnya pada 2014, baru sekitar 36% orang saja yang memiliki rekening bank. Tiga tahun sebelumnya pada 2011 bahkan jumlah yang punya rekening hanya 20% saja. Prestasi ini mencuatkan Indonesia sebagai yang tercepat di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dalam hal penggunaan rekening untuk tabungan, Indonesia juga memiliki nilai yang kuat, yakni 10 poin lebih tinggi dibanding rata-rata negara berkembang lain di dunia, 42% dari pemilik rekening menabung di institusi keuangan formal seperti bank maupun institusi keuangan mikro.

Inklusi keuangan merupakan suatu kondisi dimana semua orang berusia kerja mampu mendapatkan akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran dan asuransi dari seluruh penyedia layanan finansial. Akses yang efektif juga termasuk dalam layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat dan berkelanjutan untuk penyedia layanan. Diharapkan pada akhirnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan finansial yang formal daripada layanan finansial yang informal.

Guna mendukung hal itu, Bank Indonesia telah membuat sebuah kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan yang disebut dengan kebijakan keuangan inklusi. Kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang menysasar orang-orang

kelas menengah bawah. Jadi layanan keuangan di Indonesia tidak hanya untuk kelas menengah atas, tetapi juga kelas menengah bawah. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap produk finansial. Bank Indonesia memiliki sebuah indeks yang bertujuan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan yang disebut dengan IKI – Indeks Inklusi Keuangan. IKI terdiri dari tiga variabel utama yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan keuangan inklusi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan optimal maka dapat membawa kondisi ekonomi ke level pertumbuhan yang berkualitas.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara senantiasa konsisten dalam usahanya untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan masyarakat Indonesia, salah satu cara untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan keuangan inklusi yaitu dengan pembentukan program Agen46, yang mana Agen 46 ini merupakan mitra BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka inklusi keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun akan melakukan penelitian yang berjudul : **“Peran Inklusi Keuangan Berkaitan Dengan Produktifitas UMKM Yang Menjadi Agen46 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Blitar”**.

B. Permasalahan

Masyarakat memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan dasar yang mencakup transaksi pembayaran non-tunai, tabungan, kredit atau pembiayaan, remitansi, dan asuransi. Layanan keuangan saat ini masih didominasi oleh perbankan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan dan pembayaran. Dalam meningkatkan keuangan inklusi, selain tingkat literasi keuangan yang relatif rendah, juga terdapat tantangan dari sisi penawaran dan sisi permintaan layanan keuangan.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibentuklah program keagenan, yang mana dalam program ini menggandeng pelaku UMKM untuk berpartisipasi sebagai penyedia layanan keuangan inklusi. Selain sebagai bentuk suatu pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang menasar orang-orang kelas menengah bawah yang saat ini belum bisa mengakses layanan keuangan bank, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat perekonomian pelaku UMKM tersebut itu sendiri

Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah program *branchless banking* yang merupakan program inklusi keuangan yang didalamnya terdapat indeks keuangan inklusi (IKI) yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari tiga variabel utama yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) ini mampu meningkatkan produktifitas UMKM yang telah berpartisipasi menjadi Agen46 Bank BNI Kantor Cabang Blitar.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana keterkaitan antara program inklusi keuangan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang menjadi agen46 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa keterkaitan layanan inklusi keuangan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas UMKM yang telah berpartisipasi menjadi Agen46 di BNI Kantor Cabang Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan tentang program inklusi keuangan dan usaha mikro kecil menengah.
 - b. Mampu menjelaskan keterkaitan layanan inklusi keuangan dengan produktifitas UMKM, sehingga hasil keterkaitan tersebut dapat diaplikasikan pada kegiatan usaha UMKM yang lainnya.
2. Bagi pengembangan nilai ekonomi dan iptek
 - a. Untuk mengembangkan wawasan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang inklusi keuangan.

- b. Menambah dan mengembangkann penelitian terkait dengan program inklusi keuangan yang masih terbatas
3. Bagi masyarakat pelaku UMKM
Sebagai sarana pembelajaran dan penambah wawasan di bidang keuangan dalam bidang inklusi keuangan dan UMKM.
4. Bagi peneliti berikutnya
Topik penelitian tentang keuangan inklusi belum banyak dilakukan dikarenakan ini merupakan topik yang belum terlalu banyak dilakukan penelitian. Sehingga hasil temuan dalam penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan peneliti berikutnya.
5. Bagi STIE Kesuma Negara Blitar
Dapat menambah referensi terkait dengan topik inklusi keuangan, mengingat topik ini belum tersedia sebagai referensi sehingga dapat dijadikan bahan kajian yang lebih lanjut untuk penelitian maupun penyusunan program pembelajaran.
6. Bagi BNI Kantor Cabang Blitar
Dapat digunakan sebagai referensi untuk memetakan kembali dan memaksimalkan potensi akuisisi Agen46 yang telah ada. Sehingga dapat meningkatkan kegiatan pengimpunan dana pihak ketiga.